



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202
S A M A R I N D A

Samarinda, 19 Januari 2019

Kepada

Nomor : 700/575 /Itprov/I/2019
Lampiran : 1 (satu) buku.
Hal : Penyampaian Laporan
Kinerja Tahun 2018.

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur
Cq. Karo Organisasi
Setda Prov. Kaltim
di -
Samarinda

Dalam rangka memenuhi kewajiban pertanggung jawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, bersama ini kami disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Inspektur,

M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

Tembusan :

Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan).



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini adalah merupakan salah satu wujud diimplementasikannya good governance dan adanya tanggung jawab instansi untuk melaporkan kepada pemberi mandat dan pemangku kepentingan atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini akan memberi arti bagi para penggunanya dan sebagai salah satu bentuk gambaran peranan yang dapat diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju “ Good Governance “.

Samarinda, 4 Januari 2019

Inspektur,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP
Pembina Utama Madya
NIP. 19640519 198503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Aspek Strategis Organisasi	6
F. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi	8
G. Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Laporan Hasil Evaluasi	23

B.	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	29
C.	Analisis Capaian Kinerja	32
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kerja Tahun ini	32
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	42
3.	Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target RPJMD/Renstra	54
4.	Analisis Progra/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	58
5.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61
D.	Realisasi Anggaran	62
1.	Realisasi Anggaran Sesuai Dengan Perjanjian Kinerja	62
2.	Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan	65
BAB IV	PENUTUP	68

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2013 s.d. 2018
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 dan 2018 secara berjenjang
3. Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2017 dan 2018
4. Rencana Aksi Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018
5. Rencana Kerja Tahun 2017 dan 2018
6. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Prov. Kaltim Tahun Sebelumnya (Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya).
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumah Pegawai Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan	6
Tabel 2	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Prov. Kaltim	9
Tabel 3	Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2013 s.d. 2018	14
Tabel 4	Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran	16
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
Tabel 7	Target Belanja Tahun 2018	24
Tabel 8	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	24
Tabel 9	Hasil Evaluasi Tahun 2018 atas LKjIP Tahun 2017	26
Tabel 10	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2018 atas LKjIP Tahun 2017	27
Tabel 11	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2018	29
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan	62

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja antara Eselon II dengan Gubernur Kalimantan Timur yang akan dicapai pada tahun 2018 serta seluruh program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan pemberi amanah. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan atas dokumen Penetapan Kinerja 2018 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018.

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini juga menyajikan semua capaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja dan Program serta Kegiatan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana kinerja baik pada level output maupun outcome kegiatan yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis- analisis yang dilakukan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini juga dapat mengidentifikasi sejumlah keberhasilan kinerja yang telah dicapai dan kegagalan-kegagalan sebagai perbaikan kinerja dimasa-masa mendatang.

Dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang merupakan komitmen seluruh unsur dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan tanggung jawabnya kepada stakeholder. Target dan indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

Penilaian kinerja atas Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dilakukan terhadap indikator output maupun outcome kegiatan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan cara membandingkan antara target indikator dengan realisasinya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 menggambarkan dan menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur akan melaksanakan 6 (enam) sasaran, 14 (empat belas) indikator dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 91,30%. Sedangkan untuk pencapaian 10 Program dan 13 Kegiatan yang telah dilaksanakan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan capai fisik **100%** dan realisasi keuangan 99,89%. Untuk melaksanakan semua aktivitas tersebut disediakan dana sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.994.722.549,00 atau sebesar (93,32 %) dan Belanja Langsung sebesar Rp.7.965.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.955.715.982,00 atau sebesar (99,98%)

Dalam penyerapan anggaran secara kuantitatif masih terdapat sisa anggaran, tetapi secara kualitatif, pencapaian telah dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal dan bertanggung jawab berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sisa anggaran terjadi karena adanya efisiensi dalam pengguna anggaran, namun secara fisik telah dilaksanakan 100%.

Dalam pelaksanaan perjanjian kinerja dan program serta kegiatan masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja, namun dapat diatasi dengan baik dan sehingga permasalahan tersebut tidak terjadi secara berkelanjutan, maka telah diambil langkah-langkah perbaikan yang konkrit agar tercipta peningkatan kualitas kinerja yang berdampak pada optimalisasi realisasi perjanjian kinerja dan kualitas sumber daya manusia / personil aparat pengawasan selaku APIP.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mengharapkan bahwa Laporan Kinerja Tahun 2018 ini dapat dijadikan tolok ukur peningkatan kinerja yang dipergunakan sebagai alat pembanding pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dipenghujung bulan Desember 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang membantu tugas Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. TUGAS DAN FUNGSI.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota. Dalam rangka akuntabilitas dan objektivitas hasil

pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan, asset dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan serta memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dilingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 53 Tahun 2016, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

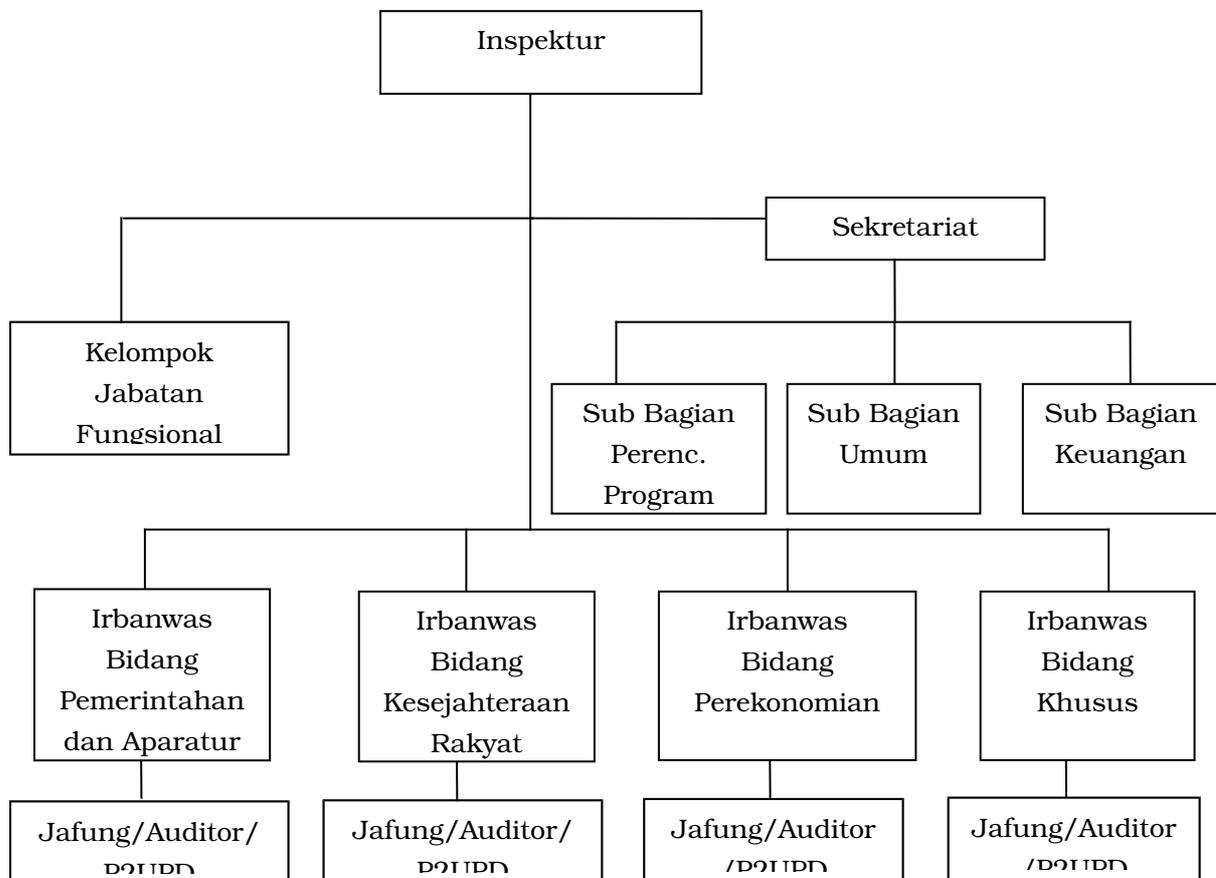
1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atau Penugasan dari Gubernur;
4. Penyusunan laporan dari hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan Program.
 2. Subbagian Umum.
 3. Subbagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



D. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 berjumlah pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 86 orang yang terdiri dari 60 orang PNS/ASN dan 26 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 86 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	21	14	5	30	-	-	3	32	-	-	-	-
Fungsional Umum	10	6	-	9	6	1	-	3	-	12	1	-
Jumlah PNS	38	23	9	45	6	1	7	41	-	12	1	-
Jumlah Honor/PTT	14	12	-	-	-	-	-	16	2	8	-	-
Jumlah PNS dan PTT	51	35	9	44	6	1	7	56	2	20	1	-

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung visi dan misi, adalah baik aspek strategis internal maupun eksternal sebagai berikut :

1. **Aspek Peraturan Perundang-Undangan**, dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi baik segi kualitas dan kuantitas.
3. **Aspek Produk Yang Dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan, hal ini sesuai

dengan amanat PP 12 Tahun 2017 dan PP 60 Tahun 2008 harus bersifat strategis. Tugas Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas Gubernur yang menjalankan amanah rakyat.

4. **Aspek Metode Pengawasan**, perlu terus dikembangkan metodologi pengawasan yang spesifik dan membawa manfaat misalnya program pemeriksaan/pengawasan, revidu, evaluasi dan monitoring, pemberian advis/saran dan konsulting dan kontrol internal.
5. **Aspek Sistem Penghargaan (Reward System)**, sistem penghargaan merupakan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau pengukuhan atas perilaku yang telah dilakukan pegawai. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi, dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai *shareholder*.
6. **Aspek Budaya Organisasi**, yang meliputi :
 - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh Aparatur Pengawasan untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi.
 - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh Aparatur Pengawasan untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.
 - c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta metarial yang ada, dan menghindari

benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.

- d. ***Independent***, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.
- e. ***Perbaikan terus menerus***, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan Organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

F. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, khususnya pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Ombudsman/Auditan.

4. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran, khususnya untuk kegiatan pengawasan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

G. SARANA DAN PRASARANA.

Guna menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang ada juga harus dipersiapkan untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan teknologi.

Berikut data sarana dan prasarana yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2018 :

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1.	Tanah	4.385	M2
2.	Gedung Kantor	2.300	M2
3.	Ruang Rapat	2	Ruang
4.	Ruang Kerja Pejabat Struktural	9	Ruang
5.	Ruang Kerja Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum	9	Ruang
6.	Ruang Arsip	7	Ruang
7.	Ruang Perpustakaan	1	Ruang
8.	Ruang Musholla	2	Ruang
9.	Ruang Dapur Masak	1	Ruang
10.	Ruang Gudang Barang	4	Ruang
11.	Taman	1	Area
12.	Kendaraan Bermotor Roda 4	20	Buah
13.	Kendaraan Bermotor Roda 2	13	Buah
14.	Meja Kerja	131	Buah
15.	Meja Komputer	16	Buah
No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
16.	Meja Rapat	8	Buah

17.	Meja Makan	1	Buah
18.	Meja Rapat Pimpinan	1	Set
19.	Kursi Putar	198	Buah
20.	Kursi Tamu	9	Set
21.	Kursi Lipat (Rusak Berat)	44	Buah
22.	Kursi Rapat	10	Buah
23.	Lemari Besi Arsip	34	Buah
24.	Lemari Perpustakaan	2	Buah
25.	Filling Cabinet	29	Buah
26.	Buffet	13	Buah
27.	Komputer / Computer	53	Unit
28.	Printer	56	Unit
29.	Laptop	39	Buah
30.	Dispenser	9	Buah
31.	Mesin Tik	3	Buah
32.	Pesawat Telepon	10	Buah
33.	Camera	6	Buah
34.	Jam Dinding	4	Buah
35.	Mesin Photo Copy	1	Buah
36.	Whiteboard	6	Buah
37.	LCD	2	Buah
38.	AC Split	6	Buah
39.	Brandkas	2	Buah
40.	Microphone	27	Buah
41.	Intercom Mobil	1	Buah
42.	Buku Perpustakaan	885	Buah
43.	Mesin Absensi	3	Buah
44.	Kulkas	6	Buah
45.	Sound System	1	Set
46.	Speaker Besar	1	Pasang
47.	Ampliplayer	1	Unit
48.	TV Led	1	Unit
49.	Sofa	1	Unit
50.	Lemari Hias	1	Buah
51.	Mesin Cuci	1	Buah
52.	Karpet	3	Buah
53.	Rak Buku / TV	2	Set
54.	Organ / Electone	1	Buah
55.	Wireless	1	Buah

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
56.	Tempat Tidur	1	Set
57.	Lemari Pakai	2	Buah
58.	Water Heather	1	Buah
59.	Monitor CCTV	1	Buah
60.	Lensa CCTV	2	Buah

61.	Handy Talkie	3	Buah
62.	Locker Rak	8	Buah
63.	Komputer Mainframe / Server	1	Unit
64.	Jaringan Komputer	1	Unit
65.	Software Off-Line Komputer	3	Unit
66.	Rak Peralatan	1	Buah
67.	Mesin Hitung Manual	1	Buah
68.	Alat Ukur Altimeter	8	Buah
69.	CPU	1	Buah
70.	GPS	4	Buah
71.	Faximale	1	Buah
72.	Tape Rocerder	4	Buah
73.	Genset	1	Unit
74.	E-Spot Aspalt Highway	1	Set

Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut, dalam hal ini masih dirasakan kurang. Meskipun demikian dapat membantu dan menunjang dalam tugas-tugas dibidang pengawasan, Dalam perkembangannya dari tahun ketahun mengalami penambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dilapangan yang dihadapi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi atau organisasi pemerintah harus dibawa agar dapat selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi atau organisasi pemerintah.

1. Visi.

“ MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL “

2. Misi.

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, maka misinya adalah :

- a. Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.***
- b. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan baik sesama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawasan Eksternal.***

c. Meningkatkan pengendalian intern pemerintah sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Tujuan.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peran untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Instansi pengawasan, Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan tujuan yang dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.
3. Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Sasaran.

Salah satu unsur dalam pencapaian kinerja yang akan memberikan hasil capaian kinerja yang optima, agar lebih dicapai tingkat keberhasilannya yang sudah ditergetkan, maka Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatnya laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP.
4. Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
7. Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disajikan secara singkat gambaran penting dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018 yang memuat antara lain Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Target Tahunan dan Program./Kegiatan serta IKU yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3
Perencanaan Strategis Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2013 s.d. 2018

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Thn 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun					
						2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	40	40	50	60	70	80	
			Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	85	85	90	93	95	97	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	54,97	60	65	68	72	75	
			Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	52,78	60	65	65	72	75	
			Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	28,57	30	50	55	60	80	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Thn 2013	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemprov Kaltim dan Kab/Kota		Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	80	80	85	90	95	95
			Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	0	5	4	3	2	2
			Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	5	20	18	15	10	10
			SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	0	1	2	3	2	2
		Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	22	32	40	42	45	45
Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	25	25	50	80	95	95
			Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	85	60	75	80	85	95
		Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	80	75	80	85	90	90
Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya Penerapan SPIP	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	1	1	2	2	3	3
			Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	%	10	10	30	50	70	100

Dalam rangka untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran serta Target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja, maka diperlu adanya Program dan Kegiatan yang menunjang sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Program dan Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7		
	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan		
			Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%		Reviu Atas Laporan Keuangan		
			Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%		Pemeriksaan Kinerja SKPD		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi		
			Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor				
Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%							

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan Kab/Kota	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Penanganan Pengaduan Masyarakat
			Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus		
			Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus		
			SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	Pengembangan Zona Integritas	Penerapan Zona Integritas pada SKPD
			Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	Peningkatan Profesional tenaga Pemeriksa dan Aparatur
2.	Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal
			Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
3.	Meningkatkan Pengendalian Intern Pemerintah	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda
			Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pengawasan yang tepat waktu	%		

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalam Renstranya tahun 2013 s.d. 2018 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan dasar dari Penetapan Kinerja yang akan ditetapkan setiap tahunnya dengan targetnya selanjutnya akan dicapai dengan dukungan program dan kegiatan. Penetapan Indikator Utama ini didasarkan atas tugas dan fungsi Inspektorat daerah Provinsi Kalimantan Timur serta disesuaikan dengan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018. Berikut ini disampaikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran dari tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 s.d. 2018.

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I	Inspektur
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irban-Irban
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota	Inspektur dan Irban-Irban serta BPKP Perwakilan

					dievaluasi.		
--	--	--	--	--	-------------	--	--

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani.	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Inspektur dan Irban Khusus
Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai		Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin	Inspektur dan Irban Khusus	
Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi		Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN dilingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN	Inspektur dan Irban-Irban	
SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM		OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur dan Irban-Irban	
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Subbagian.
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membandingkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	Inspektur dan Irban-Irban

					dalam PKPT		
--	--	--	--	--	------------	--	--

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur, Irban-Irban dan Sekretaris

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018.

Pada tahun anggaran 2018, rencana kerja tahunan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Timur dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja Tahun 2018 yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	80
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	97

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	75
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	75
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	80
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	95
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	10
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	2
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	95
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	95
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka pada tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan, ditetapkan program sebanyak 10 (sepuluh) dengan kegiatan sebanyak 13 (tiga belas), dengan alokasi anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2018 sebelum perubahan adalah sebesar Rp. 15.403.804.000,00 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 8.838.204.000,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 6.565.600.000,00 dan setelah adanya anggaran perubahan, maka jumlah anggaran tahun 2018 yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur menjadi sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 7.965.600.000,00.

Dari realisasi anggaran perubahan sebesar Rp. 17.604.555.408,00 tersebut terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.638.955.408,00 realisasi sebesar Rp. 8.994.722.549,00 (93,32%), anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.965.600.000,00 realisasi sebesar Rp. 7.955.715.982,00 (99,88%) yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.100.400.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (99,96%) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.865.200.000,00 realisasi sebesar Rp. 6.855.715.982,00 (99,86%), Belanja Modal sebesar Rp. 0,00.

2. Target Belanja Tahun 2018.

Dari dari anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2018 sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 7.965.600.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.950.438.531,00 (96,28%).

Adapun realisasi keseluruhan anggaran tidak langsung dan tidak langsung sebagaimana perincian sebagai berikut :

Tabel 7
Target Belanja Tahun 2018

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2018		%
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp)	
1.	Belanja Tidak Langsung	9.638.955.408,00	8.994.722.549,00	93,32
2.	Belanja Langsung	7.965.600.000,00	7.955.715.982,00	99,88
	JUMLAH	17.604.555.408,00	16.950.438.531,00	96,28

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.

Dari dari anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 7.965.600.000,00, maka dapat dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	400.000.000,00	5,02	Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	1.761.500.000,00	22,11	Kegiatan Pemeriksaan Kinerja, Evaluasi Sakip OPD dan Kab/Kota

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1.660.700.000,00	20,85	Kegiatan Penanganan Pengaduan dan Pencegahan dan Pemberantasan KKN
4.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas	899.360.000,00	11,29	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pelatihan di Kantor Sendiri
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	543.000.000,00	6,82	Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda.
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	136.500.000,00	1,71	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. LAPORAN HASIL EVALUASI.

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi Nomor : 700/1405-Khusus/Itprov/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dengan hasil Evaluasi sebesar **73,59** atau predikat “ **BB** “ (**Sangat Baik**), sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini :

Tabel 9
Hasil Evaluasi Tahun 2018 Atas LKjIP Tahun 2017

No.	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2017	Nilai 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,36	26,36
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,06	20,31
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,57
4.	Evaluasi Kinerja	10	8,17	8,17
5.	Capaian Kinerja	20	11,34	9,98
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,35	75,39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi.

Sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap LKjIP Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu :

Tabel 10
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2018 atas LKjIP Tahun 2017

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1.	Dalam pelaporan kinerja terhadap pemenuhan pelaporan supaya laporan kinerja dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Permenpan No. 53 Tahun 2014)	Pada tahun 2018, hal ini menjadi perhatian utama, sehingga Laporan Kinerja yang disampaikan menjadi tepat waktu.	Laporan Kinerja dibuat pada tanggal 4 Januari 2018.
2.	Dalam evaluasi internal terhadap pemenuhan evaluasi supaya hasil evaluasi internal tidak hanya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, namun perlu ditetapkan kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.	Evaluasi internal terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Inspektur, Sekretaris dan Para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Inspektorat dan selanjutnya hasil evaluasi capaian tersebut akan ditindaklanjuti terhadap beberapa capaian yang belum maksimal dan selanjutnya akan dikomunikasi kepada pihak-pihak terkait dan pihak yang berkepentingan.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Tindak Lanjutnya.
3.	Dalam pencapaian sasaran / kinerja organisasi supaya : <ul style="list-style-type: none"> Selalu berupaya meningkatkan capaian output dan outcome 	Hal ini akan selalu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan	Capaian Sasaran / Kinerja Output dan Outcome. Dokumen Renstra dan

	<p>agar pencapaian sasaran / kinerja organisasi tercapai optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal. 	<p>capaian baik output dan outcome, agar pencapaian sasaran. Kinerja organisasi tercapai optimal.</p> <p>Dalam pencapaian sasaran/kinerja pihak organisasi sudah berupaya meningkatkan capaian baik output maupun outcome. Hal ini didasarkan atas Renstra yang telah dibuat dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja disertai dengan dukungan Program dan Kegiatan serta Anggaran dan SDM.</p> <p>Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja yang bersifat analisis selalu didukung dengan data yang andal, sehingga dapat diketahui capaian sebelumnya dan capaian sesudahnya yang bersifat perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya.</p> <p>Informasi Kinerja yang sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan informasi dari capaian kinerja yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung program dan kegiatan, anggaran dan SDM.</p>	<p>Dokumen Penetapan Kinerja. (terlampir)</p> <p>Data dukung mengenai informasi capaian kinerja.</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja.</p>
--	---	---	--

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 050/K.531/2014 tanggal 08 September 2014 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/2039.a/Itprov/2015 tanggal 15 September 2014.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 91,30% sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai	Keuangan Pemprov Kaltim sesuai dan SKPD yang	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	80	80	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	sesuai SAP							
	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-		
				Triwulan III	-	-		
				Triwulan IV	97	96.82	99,81	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor		Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	75	62.69	83,95
					Triwulan IV	-	-	-
	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	75	0	0	
	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	80	55.56	69.45	
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
	Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	10	10	100	
	Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	2	0	200	
	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	OPD		Triwulan I	-	-	-	
				Triwulan II	-	-	-	
				Triwulan III	-	-	-	
				Triwulan IV	2	1	50	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Tersedianya SDM Aparatur	Aparatur Pengawasan Yang	Orang		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-

	Pengawasan Yang Profesional	Bersertifikat			Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	45	36	80.00
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	95	100
		Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	95	100	105.26
6.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%		Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	90	76	84.44

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018, yaitu terdapat 6 sasaran dengan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14 indikator telah dicapai sebesar 91,30%. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kerja tahun ini :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	80	80	100

Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan Laporan Keuangan SKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada tahun 2018 ditargetkan sebesar

80% dan telah dicapai sebesar 80% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD telah dicapai sesuai target yang ditetapkan, dimana Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi SAP dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru mencapai 80% dari standar penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan, karena pada saat dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	97	96.82	99,81

Pencapaian Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 97% dan telah dicapai sebesar 96,82% dengan capaian sebesar 99,81%, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja baru sebesar 96,82% dari target yang ditetapkan sebesar 97,00%. Pencapaian ini didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA. Namun dari capaian tersebut memang belum sesuai dengan target yang ditetapkan hal ini berdasarkan atas hasil pemeriksaan atas kinerja SPKD yang telah dilaksanakan yaitu dimana masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan dan dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian penetapan kinerjanya belum dilaksanakan secara maksimal dan masih terdapat sisa anggaran, keterbatasan waktu dan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja dan penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	75	62.69	83.95

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 75 skor dan telah dicapai 62.69 skor dengan capaian sebesar 83,95%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja SKPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Skor rata-rata Evaluasi	Skor	72	51,82	71,97

	Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Pencapaian skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari target 72 skor dan telah dicapai 51,82 skor dengan capaian sebesar 71,97%, namun capaian ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota dilaksanakan pada 4 Kab/Kota, yaitu : Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan, namun menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut Pemerintah Kab/Kota telah akan melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab/Kota yaitu dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya. Sedangkan untuk target capaian tahun 2018 nilainya belum dapat disajikan, karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	80	55,56	69,45

Pencapaian persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi dari target 80% dan telah dicapai 55,56 % dengan capaian sebesar 69,45%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26

Pencapaian persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 95% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 105,26%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan bahwa semua kasus / pengaduan yang masuk sudah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Tertangani dan dilakukannya pemeriksaan kasus/pengaduan masyarakat yang masuk disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2018

terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	10	10	100

Pencapaian menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai dari target 10 kasus dan telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun dari target penurunan kasus pelanggaran disiplin hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS serta meningkatkan kesadaran PNS/ASN atas pentingnya disiplin melalui sosialisasi dll.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0	200

Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari target 2 kasus dan telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, hal ini disebabkan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penancangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli, Kerjasama antara APIP dan APH, adanya Tim TP4D, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan meningkatkan peranan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga pengaduan/laporan/kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50,00

Pencapaian SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 2 OPD dan telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50,00%, hal ini menunjukkan bahwa capaian ini belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2018 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Abdul Wahan Sjahrane dan RSDJ Atma Husada Mahakam. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSDJ Atma Husada Mahakam, sedangkan RSUD

Abdul Wahab Sjahranie belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan terhadap RSDJ Atma Husada Mahakam sudah diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK dan sampai saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Tim Eksternal sedangkan hasilnya belum dapat disampaikan.

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	36	80,00

Pencapaian Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 45 orang dan telah dicapai 36 Orang dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 36 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	95	100

Pencapaian Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya dari target 95% dan telah dicapai 95 % dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari 46 SKPD/OPD yang terdiri dari 38 OPD dan 9 Biro dan belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dari 46 hanya 44 OPD/SKPD yang diperiksa atau 95,65 % dan ada 2 OPD/SKPD yang tidak diperiksa yaitu Badan Kesbang Pol dan Biro Humas Setda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan serta keterbatasan waktu pengawasan. Dalam rangka untuk mencapai cakupan pengawasan tersebut, maka pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan, waktu pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	95	100	105.26

Pencapaian Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan dari target 95% dan telah dicapai 100%. Hal ini menunjukkan telah dicapai, bahkan diatas target yang telah ditetapkan. Pencapaian

ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 16 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak/ Pemeriksaan atas PBJ OPD, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dengan dukungan SDM dan anggaran yang tersedia.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	90	76	80,00

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari target 90% dan telah dicapai 76% dengan capaian sebesar 80,00%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan meskipun tidak sebesar apa yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring

dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya merupakan salah satu indikator keberhasilan dari kinerja yang sudah ditetapkan, dimana akan terlihat adanya peningkatan maupun penurunan dari capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja. Berikut ini disampaikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7= $(6-5)/5*100$
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	Capai atas Opini WTP dapat dipertahankan.
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	60	70	80	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 14,29%
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	93	94,65	96,82	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 2,29%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi peningkatan dan keberhasilan pencapaian yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak

tahun 2016 s.d. 2018. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan atas Opini WTP, disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Analisis pencapaian pada indikator persentase laporan keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terjadi peningkatan dan keberhasilan dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 60%, tahun 2017 sebesar 70% dan tahun 2018 sebesar 80.%. Maka dari tahun 2016 s.d. 2018 ini pencapaian dan keberhasilannya mengalami kenaikan sebesar 14,29%. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan pencapaian ini disebabkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi dan penyajiannya sudah sesuai dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian dan keberhasilan ini adalah sudah dilakukan beberapa perbaikan atas temuan dan rekomendasi baik dari Tim Pemeriksaan / BPK-RI dan Tim Pemeriksa dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur atas Laporan Keuangan yang direviu yaitu antara lain : perbaikan atas salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, perbaikan atas kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, perbaikan atas akun

yang belum disajikan dalam Neraca, perbaikan koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, perbaikan atas perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan perbaikan atas kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut diatas akan terus dilakukan perbaikan – perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya, yaitu terjadi peningkatan pencapai dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 93%, tahun 2017 sebesar 94,65% dan tahun 2018 sebesar 96,82%, maka pencapaian dan keberhasilan ini mengalami peningkatan sebesar 2,29%. Peningkatan pencapaian ini memang belum signifikan, namun telah menunjukkan adanya peningkatan dan keberhasilan dalam pencapaiannya. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan telah dibentuknya Tim TEPPRA yang melakukan monitoring dan evaluasi melalui sistem penyerapan anggaran yang berbasis aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPRA. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian ini adalah terus melakukan koordinasi dan peningkatan komitmen dari seluruh Kepala SKPD untuk melaksanakan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai target, jadwal dan dukungan program dan kegiatan, melakukan monitoring melalui aplikasi TEPPRA Kaltim terhadap program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD dan meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat Pimpinan dengan Kepala SKPD.

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	

1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	66,92	61,89	62,60	Terjadi peningkatan capaian sebesar 1,15 %
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	61,44	51,82	0,00	Tidak dilakukan evaluasi, hasil masih menunggu dari Kementerian PAN-RB.
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	60,00	55,56	55,56	Terjadi capaian yang bersifat stagnan/ tetap/ tidak terjadi peningkatan.

- Analisis pencapaian pada indikator skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD, yaitu pada tahun 2016 sebesar 66,92 skor, tahun 2017 sebesar 61,89 skor dan tahun 2018 sebesar 62,89 skor. Perbandingan pencapaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1,15%. Terjadinya peningkatan pencapaian ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada struktur organisasi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Perubahan ini berdampak pada pembubaran OPD dan penggabungan OPD yang ada, hal lain disebabkan adanya upaya yang maksimal dari beberapa OPD yang dievaluasi terhadap capaian 5 (lima) indikator yang menjadi penilaian atas Akuntabilitas Kinerja OPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja dan ditindaklanjutinya rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan, sehingga hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan terhadap capaiannya meskipun tidak maksimal atau signifikan. Upaya – upaya yang akan dilakukan dalam rangka terus menerus untuk meningkatkan hasil evaluasi ini adalah melakukan perbaikan-perbaikan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja / LKjIP yang dibuat, melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari

hasil evaluasi, melakukan koordinasi dan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjutnya dan meningkatkan pengetahuan para Evaluator melalui Bimtek/Diklat dan studi banding agar tercipta persamaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut.

- Analisis pencapaian pada indikator skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota, yaitu pada tahun 2016 sebesar 61,44 skor, karena pada tahun 2017 sebesar 51,82 dan tahun 2018 sebesar 0,00.skor. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan pada tahun 2018. Terjadinya penurunan pencapaian ini disebabkan karena pada tahun 2018 tidak dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, hal ini disebabkan adanya keterbatasan waktu pengawasan dan SDM Pengawasan yang disebabkan adanya tugas-tugas lainnya dibidang pengawasan. Upaya – upaya kedepan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil evaluasi ini adalah melakukan perbaikan-perbaikan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja / LKjIP yang dibuat, melakukan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi, melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjutnya dan meningkatkan pengetahuan para Evaluator melalui Bimtek/Diklat dan studi banding agar tercipta persamaan persepsi dalam pelaksanaan evaluasi tersebut. Pada tahun 2018 ini juga tidak dapat ditampilkan hasilnya, kerana masih menunggu dari Kementerian PAN-RB.
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 60%, tahun 2017 sebesar 55,56% dan tahun 2018 sebesar 55,56 %. Perbandingan pencapaian pada tahun 2018 hal ini mengamali stagnan/tetap/ tidak terjadi peningkatan. Terjadinya hal ini disebabkan karena dari hasil Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan, yaitu pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, masih terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat Sangat Tinggi, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau,

Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, dan meningkatkan pengetahuan Tim Evaluator dalam rangka persamaan persepsi terhadap hasil evaluasi.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7=(6-5)/5*100
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	90	100	100	Tidak Terjadi peningkatan/ stagnan/tetap.
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	15	10	10	Tidak Terjadi peningkatan/ stagnan/ tetap.
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	0,00	0,00	0,00	Tidak terjadi perubahan/ tetap
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	2	2	Tidak terjadi perubahan/ tetap.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani, yaitu pada tahun 2016 sebesar 90%, tahun 2017 sebesar 100% dan tahun 2018 sebesar 100%. Perbandingan pencapaian pada tahun 2018 tidak terjadi peningkatan/ tetap, bahwa pengaduan masyarakat yang masuk semua diselesaikan dan dilakukan pemeriksaan atas

kebenarannya. Hal ini disebabkan, karena penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah ditangani atau sudah dilakukan pemeriksaan. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adanya dukungan anggaran dan SDM serta sejak tahun 2016 s.d. 2018 ini terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, terdapat Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan pemeriksaan atas kebenaran statusnya, sehingga semua pengaduan masyarakat dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan.

- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai, yaitu pada 2016 terjadi 15 kasus, tahun 2017 terjadi 10 kasus dan tahun 2018 terjadi 10 kasus. Perbandingan pencapaian pada tahun 2018 tidak terjadi peningkatan kasus pelanggaran disiplin pegawai ini menunjukkan adanya trend positif karena kasus pelanggaran disiplin pegawai diharapkan terjadi penurunan. Target penurunan atas kasus pelanggaran disiplin menjadi prioritas utama, dan beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan internal yang dilakukan oleh masing-masing Kepala/Atasan pada OPD, meningkatkannya kesadaran pegawai akan pentingnya disiplin pegawai dan adanya penerapan/pemberian sanksi yang tegas terhadap semua pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan, kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu pada tahun 2016 tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN, tahun 2017 juga tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN dan tahun 2018 juga tidak terjadi, hal ini disebabkan, karena beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsim Kalimantan Timur antara lain : adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim

Saberpungli dan adanya inisiatif dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berperan sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga Kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

- Analisis pencapaian pada indikator SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu pada tahun 2016 ditetapkan 2 RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dan pada tahun 2017 ditetapkan 2 OPD, yaitu RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim sedangkan tahun 2018 ditetapkan 2 OPD, yaitu RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RSDJ Atma Husada Mahakam. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSDJ Atma Husada Mahakam Samarinda, sedangkan RSUD Abdul Wahab Sjahranie belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun tahun berikutnya. Pada tahun 2019 kegiatan ini tetap dilaksanakan yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap OPD yang belum mencapai nilai untuk ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM.

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2016	2017	2018	

1	2	3	4	5	6	Tahun 2018 $7 = \frac{(6-5)}{5} \times 100$
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	36	39	36	Terjadi penurunan sebesar -7,69 %

- Analisis pencapaian pada indikator Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat, yaitu pada tahun 2016 sebanyak 36 orang, pada tahun 2017 sebanyak 39 orang Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat dan pada tahun 2018 sebanyak 36 orang. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan sebesar -7,69%. Terjadinya penurunan disebabkan antara lain adalah alih tugas dari jabatan fungsional ke Struktural dan beberapa orang Pejabat Fungsional Pengawasan yang purnah tugas dan meninggal dunia. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2018 $7 = \frac{(6-5)}{5} \times 100$
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	80	71	95	Terjadi peningkatan sebesar 33,80 %
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	80	100	100	Tidak Terjadi peningkatan atau Stagnan/ Tetap.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai, yaitu pada tahun 2016 sebesar 80%, tahun 2017 sebesar 71% dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 95%. Terjadinya peningkatan cakupan pengawasan ini disebabkan antara lain bahwa cakupan pengawasan ini didasarkan atas jumlah SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebanyak 46 OPD, yang terdiri dari 37 SKPD/OPD dan 9 Biro dan dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan pada tahun 2018 sebanyak 44 OPD, dan 2 OPD yang tidak dilakukan pengawasan adalah Badan Kesbang Pol dan Biro Humas Setda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan dan keterbatasan waktu pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan adanya beberapa kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan akibat kebijakan pemerintah dan kebijakan daerah. Upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan cakupan pengawasan tersebut antara lain melakukan pengawasan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko atas OPD yang diawasi yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan dukungan anggaran SDM pengawasan.
- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Kegiatan Pengawasan yang Sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 80%, tahun 2017 sebesar 100% dan pada tahun 2018 sebesar 100%. Perbandingan pencapaian ini tidak terjadi peningkatan capaian, hal ini disebabkan antara lain bahwa semua Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 18 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan

Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia, adanya dukung SDM aparatur pengawasan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan dan program pengawasan yang telah ditetapkan dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur juga menerapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan/pengawasan berdasarkan audit universe yang sudah dibuat serta disesuaikan dengan besaran anggaran pengawasan yang tersedia. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian ini antara lain, yaitu berkomitmen untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Kebijakan dan Program Pengawasan yang telah ditetapkan, menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan, setiap tahun menetapkan peta auditan/audit universe dalam menentukan kebijakan dan program pengawasan.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan Tahun 2018
			2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6-5}{5} \times 100$
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	85	82	76	Terjadi penurunan capaian sebesar -7,32%

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, yaitu tahun 2016 sebesar 85%, tahun 2017 sebesar 82% dan tahun 2018 sebesar 76%. Perbandingan pencapaian ini mengalami penurunan capaian sebesar 7,32%. Terjadinya penurunan capaian ini disebabkan antara lain masih rendahnya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan, kurangnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya dan belum adanya sanksi

yang tegas apabila hasil pengawasan/pemeriksaan tidak ditindaklanjuti oleh Auditor/Obrik, terjadi jumlah temuan dan rekomendasi yang berbeda setiap tahunnya dan sampai dengan saat ini masih dilakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan tersebut hal ini juga berdampak terhadap hasil capaian tindak lanjutnya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat antara lain adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberikan sanksi yang tegas. Diharapkan dengan adanya upaya-upaya tersebut, pada tahun – tahun mendatang penyelesaian tindak lanjut terhadap hasil pengawasan/pemeriksaan dapat terus meningkat, karena pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

3. Membandingkan Realiasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi (RPJMD/Renstra).

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dan terget jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang juga dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, bahwa pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terdapat Indikator yang harus dicapai dalam Renstra dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ada 4 indikator sesuai dengan misi 4 dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 s.d. 2018, yaitu :

- a. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.
- b. Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai ” Sangat Tinggi ”
- c. Jumlah Kasus Yang Berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
- d. OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM

Perbandingan pencapaian terhadap 4 indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	Tetap pada Opini WTP
2.	Persentase LPPD Kab/Kota Yang Mendapat Nilai " Sangat Tinggi "	%	80 %	55,56 %	Tidak Terjadi peningkatan/ stagnan/ tetap.
3.	Jumlah Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan.	Kasus	2	0,00	Tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN.
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	2	1	Terjadi penurunan capaian -50%

- Analisis pencapaian pada indikator kinerja Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terjadi peningkatan dan keberhasilan pencapaian yaitu diperolehnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Opini WTP sejak tahun 2016 s.d. 2018. Terjadinya peningkatan dan keberhasilan atas Opini WTP, disebabkan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi telah dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan/ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mempertahankan Opini WTP ini adalah, antara lain : Diterapkannya kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adanya perbaikan atas penatausahaan persediaan, perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua serta terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- Analisis pencapaian pada indikator Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi, yaitu pada tahun 2016 sebesar 60%, tahun 2017 sebesar 55,56% dan tahun 2018 sebesar 55,56%. Perbandingan pencapaian ini tidak mengalami peningkatan atau tetap pada tahun 2018 sebesar 55,56%. Terjadinya hal ini disebabkan hasil Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan, yaitu pada Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, terdapat terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat **Sangat Tinggi**, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kota Balikpapan, sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih adanya kurang data dukung, dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil evaluasi antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota, dan meningkatkan pengetahuan Tim Evaluator dalam rangka persamaan persepsi terhadap hasil evaluasi.
- Analisis pencapaian pada indikator Menurunnya Kasus Yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi, yaitu pada tahun 2016 s.d. 2018 tidak terjadi kasus yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tidak terjadinya kasus yang berindikasi KKN ini disebabkan, karena beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur antara lain : adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpungli dan adanya inisiatif dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah berperan sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Dengan demikian diharapkan pada tahun-tahun mendatang hal ini dapat terus dipertahankan, sehingga Kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi, agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

- Analisis pencapaian pada indikator OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM, yaitu pada tahun 2017, yaitu RSUD Kanujoso dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan pada bulan Desember 2017 RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan sudah ditetapkan sebagai SKPD/OPD ZI dengan Predikat WBK, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Pada tahun 2018 ini juga telah ditetapkan 2 OPD sebagai Pilot ZI menuju WBK/WBBM yaitu RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RSDJ Atma Husada Mahakam. Setelah dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim Internal Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur maka RSDJ Atma Husada Mahakam telah memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai ZI Menuju WBK ke Kementerian PAN-RB dan sampai saat ini masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian PAN-RB. Sedangkan terhadap RSUD Abdul Wahab Sjahranie masih dilakukan pembinaan dan evaluasi agar pada tahun mendatang dapat diusulkan sebagai ZI menuju WBK. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan

menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun tahun berikutnya.

4. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2018 telah ditetapkan 6 sasaran, 14 Indikator kinerja dan capaiannya 91,30.% yang didukung program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2018. Program dan Kegiatan ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu Program dan Kegiatan Prioritas (utama) dan Program dan Kegiatan Penunjang. Program dan Kegiatan Prioritas itulah yang banyak menunjang tercapainya sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Reviu Atas Laporan Keuangan
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	%	80	80	100	
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	%	97	96,82	99,81	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja SKPD

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	75	62,69	83,95	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja dengan Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	75	0,00	0,00	Kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	80	55,56	69,45	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan dengan Kegiatan Pemeriksaan Kinerja SKPD yang berada pada Sub Kegiatan Evaluasi LPPD Kab/Kota.

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	95	100	105,26	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	Kasus	10	10	100	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN dengan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	2	0,00	200	Program Pengembangan Zona Integritas dengan Kegiatan
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	OPD	2	1	50,00	Program Pengembangan Zona Integritas dengan Kegiatan

						Penerapan Zona Integritas pada SKPD.
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	45	36	80,00	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	%	95	95	100	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda dengan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda.
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	%	95	100	105,26	

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	%	90	76	84,44	Program Peningkatan Penyelesaian

	Pengawasan					Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
--	------------	--	--	--	--	---

Berdasarkan analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan sangat berperan dalam pencapaian kinerja karena Program dan Kegiatan tersebut telah sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa sasaran dan indikator belum tercapai secara maksimal, namun dukungan program dan kegiatan juga turut menentukan keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaiannya 100% atau diatas 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi yang sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi. Berikut disampaikan efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal seperti anggaran dan dan SDM Aparatur Pengawasan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 (4-5)
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	99,95	0,05
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	100	99,95	0,05
2.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	105,26	99,81	5,54
		Menurunnya kasus	100	99,81	5,54

		pelanggaran disiplin Pegawai			
		Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	200	99,94	100,96
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan Yang akan dicapai	100	99,97	0,03
		Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	105,26	99,97	5,29

Tabel 12

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD Non Gaji		Jumlah Program / Kegiatan Yang dialokasi		Total Program / Kegiatan	
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Prog	Keg	Prog	Keg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017	7.100.000.000	6.898.948.035	0,97	97,17	1.074.900.000	8.945.791.000	7	9	11	16
2018	7.965.600.000	7.955.715.982	1,00	99,88	1.100.400.000	9.963.955.408	7	9	10	13

D. REALISASI ANGGARAN

Dalam sub ini akan menguraikan anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja :

Sasaran 1 : Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100			
2.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	80	80	100	400.000.000	399.802.500	99,95
3.	Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya.	97	96,82	99,81	650.000.000	635.500.000	97,77

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75	62,69	83,95			
2.	Skor rata-rata Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	75	0,00	0,00	611.500.000	611.480.500	100,00
3.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai	80	55,56	69,45	500.000.000	472.500.000	99,81

	Sangat Tinggi						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Sasaran 3 : Menurunnya Kasus dan Penyimpangan Yang Terjadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	95	100	105,26	182.000.000	181.648.800	99,81
2.	Menurunnya kasus pelanggaran disiplin Pegawai	10	10	100			
3.	Menurunnya Kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	2	0,00	200	1.478.700.000	1.477.750.850	99,94
4.	SKPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	2	1	50,00	103.300.000	102.912.100	99,62

Sasaran 4 : Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan Yang Profesional dan Berintegritas.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat	45	36	80,00	63.860.000	63.860.000	100,00

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai	95	95	100	543.000.000	543.854.300	99,97
2.	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Sesuai Dengan Kebijakan dan Program Pengawasan	95	100	105,26			

Sasaran 6 : Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90	76	84,44	136.500.000	135.459.100	99,24

2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.

Anggaran yang dialokasikan pada tahun 2018 untuk menunjang kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur setelah perubahan adalah sebesar Rp. 17.604.555.408,00 yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.994.722.549,00 (93,32%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.965.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.955.715.982,00 (99,88%). Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran masing –masing Program dan Kegiatan tahun 2018 setelah perubahan sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target / Alokasi	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	1.142.640.000	1.136.292.582	99,44	Fisik 100%
a.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1.142.640.000	1.136.292.582	99,44	Fisik 100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.100.000	140.950.583	99,89	Fisik 100%
a.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	141.100.000	140.950.583	99,89	Fisik 100%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1.378.500.000	1.379.149.117	99,97	Fisik 100%
a.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	543.000.000	542.854.300	99,97	Fisik 100%
b.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	835.500.000	835.294.817	99,98	Fisik 100%
4.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	78.000.000	77.920.700	99,90	Fisik 100%
a.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	78.000.000	77.920.700	99,90	Fisik 100%
5.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	2.649.500.000	2.649.291.650	99,99	Fisik 100%
a.	Reviu Atas Laporan Keuangan	400.000.000	399.802.500	99,95	Fisik 100%
b.	Pemeriksaan Kinerja SKPD	2.249.500.000	2.249.489.150	100,00	Fisik 100%
6.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	611.500.000	611.480.500	100,00	Fisik 100%
a.	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	611.500.000	611.480.500	100,00	Fisik 100%
7.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	136.500.000	135.459.100	99,24	Fisik 100%
a.	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	136.500.000	135.459.100	99,24	Fisik 100%
8.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	63.860.000	63.860.000	100	Fisik 100%

a.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan	63.860.000	63.860.000	100	Fisik 100%
9.	Program Pengembangan Zona Integritas	103.300.000	102.912.100	99,62	Fisik 100%
a.	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	103.300.000	102.912.100	99,62	Fisik 100%
10.	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.660.700.000	1.659.399.650	99,92	Fisik 100%
a.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	182.000.000	181.648.800	99,81	Fisik 100%
b.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	1.478.700.000	1.477.750.850	99,94	Fisik 100%

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja telah ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2018 yang berisikan capaian dan hambatan-hambatan dalam pencapaiannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2018, yaitu terdapat 6 sasaran dan 14 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap 6 sasaran dan 14 indikator telah dicapai sebesar 91,30%.

Secara umum dapat dikemukakan pencapaian kinerja organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 dan langkah-langkah di masa yang akan datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya dalah sebagai berikut :

1. *Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian WTP.*

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), efektivitas dalam Sistem Pengendalian Intern dan adanya Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang juga yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-

usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan serta selalu melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

- 2. *Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dengan capaian 80%*** kesesuaiannya dengan SAP. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memenuhi dan menyajikan kesesuaian dengan standar / kaedah-kaedah dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), meskipun kesesuaiannya baru mencapai 80% dari standar yang ditetapkan, karena pada saat dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tersebut masih ditemukan yaitu : (1) masih terdapat salah penyajian/klasifikasi asset didalam Neraca, (2) terdapat kelebihan didalam penyajian/overstated di Neraca, (3) akun yang belum disajikan dalam Neraca, (4) terdapat koreksi atas pemusnahan/ penghapusan asset lain-lain, (5) terdapat perbedaan nilai persediaan antara Sistem Informasi Kaltim untuk asset Persediaan (SIKAP) dengan Nilai yang disajikan di Aplikasi SIMDA Keuangan) dan (6) masih terdapat kejadian yang belum jelas di Laporan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Terhadap hal-hal tersebut dilakukan upaya-upaya perbaikan yang disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan melakukan penyelesaian atas rekomendasi – rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan kedepan diharapkan tidak ada lagi temuan yang sifatnya berulang-ulang.

3. ***Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya telah dicapai sebesar 96,82% dengan capaian sebesar 99,81%***, hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja SKPD yang sesuai dengan Tupoksi dan Penetapan Kinerja didasarkan adanya komitmen dari Kepala SKPD untuk menjalankan dan melaksanakan Penetapan Kinerja, Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPRAs Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPRAs. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan pencapaian tersebut antara lain melakukan koordinasi dan peningkatan komitmen dari seluruh Kepala SKPD untuk melaksanakan Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan sesuai target, jadwal dan dukungan program dan kegiatan, melakukan monitoring melalui aplikasi TEPRAs Kaltim terhadap program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD dan meningkatkan pelaksanaan rapat-rapat Pimpinan dengan Kepala SKPD.
4. ***Skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja SKPD / Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dicapai 62,69 skor dengan capaian sebesar 83,95%***, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari segi capaian belum tercapai sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akutabilitas Kinerja OPD tersebut, yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja masih dirasakan belum maksimal dan masih dibawah target yang ditetapkan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan capaian tersebut, antara lain melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, melakukan perbaikan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah dibuat sesuai standar yang ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi,

sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerja dan terjadi peningkatan capaiannya.

5. **Skor rata-rata hasil evaluasi Akutabilitas Kinerja Kab/Kota / Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dicapai 0,00 skor dengan capaian sebesar 0,00%.** Pada tahun 2018 Evaluasi Akutabilitas Kinerja pada Pemda Kab/Kota tidak dilaksanakan, karena disebabkan keterbatasan SDM dan waktu pengawasan yang disebabkan karena adanya kegiatan pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, antara lain : melakukan penyelesaian atas tindak lanjut hasil evaluasi, melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pada Evaluator melalui Bimtek/Diklat serta melakukan studi banding kepada Kab/Kota yang sudah mendapat nilai LKjIP yang sangat tinggi.
6. **Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi telah dicapai 55,56% dengan capaian sebesar 69,45.%.** Pada tahun 2018 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 9 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu tidak dievaluasi. Dari hasil evaluasi terdapat 5 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat **Sangat Tinggi**, yaitu Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kota Balikpapan. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat Tinggi, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Timur. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipergaruhi oleh adanya beberapa data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota belum/masih kurang dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya

– upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

7. ***Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 105,26%***, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah sudah ditangani sudah dilakukan pemeriksaan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian ini, antara lain dukungan anggaran dan SDM serta pada tahun 2018 terjadi perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk.
8. ***Menurunnya kasus pelanggaran disiplin pegawai telah dicapai 10 kasus dengan capaian sebesar 100%***, hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kasus pelanggaran disiplin oleh pegawai/PNS yang disebabkan antara lain kurangnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan kurang memberikan efek jera serta lemahnya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/PNS yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/PNS ini dilakukan upaya-upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/PNS dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS berdasarkan PP 53 Tahun 2010.

9. Pencapaian menurunnya kasus yang berindikasi KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah dicapai 0 kasus dengan capaian sebesar 200%, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang berindikasi KKN tidak terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka menurunkan kasus yang berindikasi KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya adalah kebijakan tentang pedoman gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pencanangan Zone Integritas menuju WBK/WBBM, kebijakan tentang pola hidup sederhana dan Aksi Daerah berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang setiap tahun dibuat, Pembentukan Tim Saberpongli, meningkatkan kontrol internal sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan peningkatan peran dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai konsulting dan pemberian advis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD.

10. SKPD/OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM telah dicapai 1 OPD dengan capaian sebesar 50,00%. Pada tahun 2018 ini ditetapkan 2 OPD yang menjadi Pilot Project sebagai ZI Menuju WBK/WBBM, yaitu RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi dari Tim Internal dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terhadap 2 OPD tersebut yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan ke Kementerian PAN-RB untuk ditetapkan sebagai OPD ZI menuju WBK/WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan pada bulan Desember 2017 telah ditetapkan RSUD Kanujoso Djatiwibowo sebagai OPD ZI Menuju WBK, sedangkan UPTD BKMOM Dinas Kesehatan Prov. Kaltim belum memenuhi persyaratan dan sampai saat ini akan terus dilakukan pembinaan dan evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dan diharapkan pada tahun mendatang akan diusulkan ke Kementerian PAN-RB. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain melakukan

koordinasi dan pembinaan atas OPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI menuju WBK untuk selanjutnya akan diusulkan menjadi WBBM setelah 2 tahun dilaksanakan ZI menuju WBK, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap OPD yang bersifat memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat untuk selanjutnya ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada tahun tahun berikutnya.

- 11. Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat telah dicapai 36 Orang dengan capaian sebesar 80,00%.** Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari SKPD Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawas.
- 12. Persentase Cakupan Pengawasan Yang Akan Dicapai oleh Inspektorat Priovinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya telah dicapai 95% dengan capaian sebesar 100%.** Pencapaian cakupan pengawasan ini didasarkan atas SKPD/OPD yang akan dilakukan pemeriksaan / Pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 46 OPD yang terdiri - dari 37 SKPD/OPD dan 9 Biro namun pada kenyataannya belum semua OPD/SKPD dapat dilakukan pengawasan/pemeriksaan dan baru mencapai 94 % s.d. 95% atau 44 OPD/SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Timur dan 2 OPD yang tidak diperiksa adalah Badan Kesbang Pol dan Biro Humas Setda Prov. Kaltim. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan Aparatur Pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, adanya kegiatan-kegiatan di luar pengawasan yang harus dilaksanakan dan keterbatasan anggaran pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pencapaian cakupan ini, antara lain berkomitmen dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan didasarkan atas skala prioritas dan penilaian risiko yang tertuang dalam Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan serta meningkatkan dukungan anggaran pengawasan.

- 13. *Persentase Kegiatan Pengawasan yang sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan Program Pengawasan telah dicapai 100%.*** Pencapaian ini didasarkan atas Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan yang dibuat oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), yang mencakup 18 kegiatan pengawasan, antara lain Pemeriksaan Kinerja, Reviu Atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD, Reviu LKjIP Pemprov, Evaluasi SAKIP/LKjIP OPD dan Kab/Kota, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Monev Hibah/Bansos, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Pemeriksaan Serentak, Pemberian Advis/Saran/Pendapat dan Kegiatan Pengawasan lainnya seperti Penerapan ZI menuju WBK, Unit Saber Pungli, PMPRB dan Aksi-PPK Daerah sudah dilaksanakan sesuai jadwal dan anggaran yang tersedia. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan capaian tersebut, antara lain berkomitmen untuk melakukan pengawasan/pemeriksaan berdasarkan Kebijakan dan Program Pengawasan yang telah ditetapkan, menetapkan skala prioritas dalam melakukan pengawasan/pemeriksaan, setiap tahun menetapkan peta auditan/audit universe dalam menentukan kebijakan dan program pengawasan.

14. *Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan telah dicapai 76% dengan capaian sebesar 84,44%.* Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Upaya-upaya yang sudah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan antara lain meningkatkan kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan memberikan ruang konsultasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan untuk ditindaklanjuti, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 4 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat, agar dapat diimplementasikan serta dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian kinerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

DAFTAR LAMPIRAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP DARI
INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN SEBELUMNYA TAHUN 2017
(REKOMENDASI DAN TINDAKLANJUTINYA)**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
1.	Dalam pelaporan kinerja terhadap pemenuhan pelaporan supaya laporan kinerja dapat disampaikan tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan (Permenpan No. 53 Tahun 2014)	Pada tahun 2018, hal ini menjadi perhatian utama, sehingga Laporan Kinerja yang disampaikan menjadi tepat waktu.	Laporan Kinerja dibuat pada tanggal 4 Januari 2018.
2.	Dalam evaluasi internal terhadap pemenuhan evaluasi supaya hasil evaluasi internal tidak hanya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, namun perlu ditetapkan kesepakatan mengenai tindak lanjutnya.	Evaluasi internal terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Inspektur, Sekretaris dan Para Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Inspektorat dan selanjutnya hasil evaluasi capaian tersebut akan ditindaklanjuti terhadap beberapa capaian yang belum maksimal dan selanjutnya akan dikomunikasi kepada pihak-pihak terkait dan pihak yang berkepentingan.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Tindak Lanjutnya.
3.	<p>Dalam pencapaian sasaran / kinerja organisasi supaya :</p> <ul style="list-style-type: none"> Selalu berupaya meningkatkan capaian output dan outcome agar pencapaian sasaran / kinerja organisasi tercapai optimal. 	<p>Hal ini akan selalu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan capaian output dan outcome, agar pencapaian sasaran. Kinerja organisasi tercapai optimal.</p> <p>Dalam pencapaian</p>	<p>Capaian Sasaran / Kinerja Output dan Outcome.</p> <p>Dokumen Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja. (terlampir)</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Informasi mengenai kinerja didukung dengan data yang andal. 	<p>sasaran/kinerja pihak organisasi sudah berupaya meningkatkan capaian baik output maupun outcome. Hal ini didasarkan atas Renstra yang telah dibuat dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja disertai dengan dukung Program dan Kegiatan serta Anggaran dan SDM.</p> <p>Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja yang bersifat analisis selalu didukung dengan data yang andal, sehingga dapat diketahui capaian sebelumnya dan capaian sesudahnya yang bersifat perbandingan terhadap capaian tahun sebelumnya.</p> <p>Informasi Kinerja yang sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan informasi dari capaian kinerja yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung program dan kegiatan, anggaran dan SDM.</p>	<p>Data dukung mengenai informasi capaian kinerja.</p> <p>Dokumen Laporan Kinerja.</p>
--	---	--	--

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2017

- Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim
- Jabatan : Inspektur Provinsi Kaltim
- Tugas : 1. Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pengawana untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan
7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini WTP	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	70%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	95%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	70 Skor	Menjamin LKJIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKJIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKJIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKJIP SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	70 Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	60 %	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	95 %	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani.	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	10 Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	2 Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN di lingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	2 OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/ WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90 %	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	95 %	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membanding kan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawa san
		Presentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	85%	Menjamin program pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.	Membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan PKPT yang telah ditetapkan.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang bersertifikat	45 Org	Menjamin tersedia SDM Aparatur Pengawasan yang professional dan berintegritas dengan dukungan sertifikasi penjurangan.	Membandingkan jumlah SDM Aparatur Pengawasan bersertifikat dengan yang belum mempunyai sertifikat penjurangan	Daftar Personil Aparatur Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat Penjurangan
7.	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level 3	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Prov. Kaltim

Jabatan : Inspektur Provinsi Kaltim

Tugas : 1. Membantu Gubernur Dalam Membina dan Mengawasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
2. Melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pengawana untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.
4. Penyusunan Laporan dari hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Daerah Provinsi.
6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan
7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini WTP	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	80%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	97%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksaan an atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksaan an Kinerja SKPD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75 Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	75 Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	80 %	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	95 %	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani.	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	10 Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	2 Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN di lingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	2 OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/ WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/ WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	90 %	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	95 %	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membanding kan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawa san
		Presentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	95%	Menjamin program pengawasan yang sudah ditetapkan dalam PKPT dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.	Membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan PKPT yang telah ditetapkan.	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
6.	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Berintegritas	Aparatur Pengawasan Yang bersertifikat	45 Org	Menjamin tersedia SDM Aparatur Pengawasan yang professional dan berintegritas dengan dukungan sertifikasi penjurangan.	Membandingkan jumlah SDM Aparatur Pengawasan bersertifikat dengan yang belum mempunyai sertifikat penjurangan	Daftar Personil Aparatur Pengawasan Yang Memiliki Sertifikat Penjurangan
7.	Terlaksananya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kapabilitas APIP Inspektorat Prov. Kaltim	Level 3	Menjamin Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3	Hasil Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT PROV. KALTIM TAHUN 2013 S.D. 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	Opini	Menjamin Laporan Keuangan yang dibuat sesuai SAP	Berdasarkan Opini BPK-RI atas LKPD Pemprov Kaltim	LHP BPK-RI pada Buku I	Inspektur
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	%	Menjamin Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD sesuai SAP	Laporan Hasil Reviu Keuangan Pemprov dan SKPD	Inspektur dan Irbn-Irbn
		Persentase Capaian Kinerja SKPD yang sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	%	Menjamin Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi dan Penetapan Kinerja	Melakukan Pemeriksaan atas Kinerja SKPD yang meliputi : Capaian prog/keg, keuangan, SDM, Asset, SPI, dan 3 E.	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja SKPD	Inspektur dan Irbn-Irbn
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh SKPD sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP SKPD yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irbn-Irbn
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	Skor	Menjamin LKjIP yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan hasil evaluasi.	Melakukan Evaluasi Atas LKjIP Pemda Kab/Kota yang disesuaikan dengan Template Evaluasi LKjIP.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP SKPD	Inspektur dan Irbn-Irbn
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai Sangat Tinggi	%	Menjamin LPPD yang dibuat oleh Pemda Kab/Kota sesuai dengan Pedoman Evaluasi.	Melakukan Evaluasi atas LPPD Kab/Kota, dari hasil evaluasi diperoleh Kab/Kota nilai Sangat Tinggi dibanding dengan jumlah LPPD Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan Hasil Evaluasi LPPD Kab/Kota	Inspektur dan Irbn-Irbn serta BPKP Perwakilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Menurunnya Kasus dan Penyimpangan yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	%	Menjamin pengaduan masyarakat yang diterima terbukti kebenarannya atau tidak	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang masuk dibanding dengan yang diperiksa / ditangani.	Rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	Menjamin tingkat pelanggaran disiplin Pegawai dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas kasus-kasus pelanggaran disiplin	Inspektur dan Irban Khusus
		Menurunnya Kasus KKN di Lingkungan Pemerintah Provinsi	Kasus	Menjamin kasus-kasus KKN di lingkungan Pemprov dapat berkurang	Melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus KKN	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus-Kasus KKN	Inspektur dan Irban-Irban
		SKPD yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	OPD	Menjamin SKPD yang ditetapkan sebagai ZI WBK/WBBM dapat berintegritas	Melakukan evaluasi dan pendampingan kepada SKPD yang menjadi Pilot Project ZI menuju WBK/WBBM sesuai Template Evaluasi ZI	Laporan Hasil Evaluasi	Inspektur dan Irban-Irban
4.	Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	%	Menjamin tindak lanjut yang disampaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi	Membandingkan jumlah temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan dengan kesesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan	Matrik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Subbagian.
5.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Persentase Cakupan Pengawasan yang akan dicapai	%	Menjamin cakupan pengawasan dapat ditingkatkan	Membandingkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan target yang ditetapkan dalam PKPT	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	Inspektur dan Irban-Irban

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Opini	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov yang sesuai SAP	Persen	60
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	Persen	60
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	Persen	93
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	70
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota	Skor	70
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat Nilai Sangat Tinggi	Persen	60
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	90
		Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi.	Kasus	3
		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	15
		Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	3

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	85
5.	Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Aparatur pengawasan yang bersertifikat	Orang	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Cakupan pengawasan yang akan dicapai	Persen	80
		Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Pengawasan	Persen	80
7.	Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	Skor	2
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	Persen	50

REALISASI DAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WDP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	Persentase	60	60	100
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	Persentase	60	60	100
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	Persentase	93	94,35	101,44
		Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	70	66,92	95,60
		Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	70	61,44	97,14
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	Persentase	60	100	166,67
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase	90	100	111,11
		Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	3	0,00	100
		Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	15	15	100
		Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	3	2	66,67

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil	Persentase	85	85	100

	hasil pengawasan	pengawasan				
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	Orang	45	36	80
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Cakupan Pengawasan yang akan di capai	Persentase	80	80	100
		Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	Persentase	80	100	125
7.	Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*)	Skor	2	0	0
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	Persentase	50	50	100

(*) tidak dilaksanakan dikarenakan rasionalisasi anggaran.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
-----	-------------------	-------------------	--------

(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a.	Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
		b.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	70
		c.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	70
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	a.	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	95
		b.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	72
		c.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kab/Kota	72
		d.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	60
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
		b.	Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
		c.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM (*)	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a.	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a.	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai.	95
		b.	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	85
7.	Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	a.	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD (*)	-
		b.	Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu (*)	-

(*) tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran

PROGRAM YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	1.748.350.000,00	APBD
2.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	360.500.000,0	APBD
3.	Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah (*)	Rp.	0,00	-
4.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp.	1.515.000.000,00	APBD

5.	Pembangunan Zona Integritas	Rp.	103.300.000,00	APBD
6.	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp.	136.500.000,00	APBD
7.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	70.000.000,00	APBD
8.	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Rp.	61.000.000,00	APBD
9.	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (*)	Rp.	0,00	-

(*) tidak dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran

REALISASI DAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	Persentase	50	50	100
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang	Persentase	50	50	100

		sesuai SAP				
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	Persentase	90	90	100
		Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Skor	65	59,45	91,46
		Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	65	0	0
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	Persentase	50	55,56	111
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persentase	85	100	117
		Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	4	0	100
		Jumlah pelanggaran Disiplin Pegawai	Kasus	18	2	11,11
		Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	3	3	100
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase	80	75	93,75
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	Orang	40	32	80,00
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Cakupan Pengawasan yang akan di capai	Persentase	50	40,38	80,76
		Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	Persentase	75	88,24	117,65
7.	Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Skor rata-rata Penerapan SPIP SKPD	Skor	2	2	100
		Persentase laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	Persentase	30	50	166,67

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013-2018 INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target / Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemprov	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov kaltim sesuai SAP	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase Laporan	Persen	40	50	60	70	80

Kaltim dan Kab/Kota		Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP						
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	Persen	40	50	60	70	80
	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	80	85	90	95	95
		Jumlah kasus KKN dilingkungan Pemprov	Kasus	5	4	3	2	2
		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	20	18	15	10	10
		Penerapan ZI menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	1	2	3	2	2

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target / Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018
		Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	Orang	34	36	40	45	45
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	Persen	85	90	93	95	97
			Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas	Skor	60	65	70	72	75

			kinerja SKPD						
			Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kab/Kota	Skor	60	65	70	72	75
			Persentase LPPD Kab/ Kota yang mendapat nilai sangat tinggi	Persen	30	50	60	60	80
2.	Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	75	80	85	90	90
		Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	Cakupan Pengawasan Yang akan dicapai	Persen	25	50	80	95	95
			Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	Persen	60	75	80	85	95
3.	Meningkatkan pengendalian intern pemerintah	Terlaksananya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Skor rata-rata penerapan SPIP SKPD	Skor	2	2	2	3	3
			Persentase laporan hasil pengawasan yang terbit tepat waktu	Persen	10	30	50	70	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	a.	Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	WTP	
		b.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Tinggi	2	
		c.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	3	
		d.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori \geq B	29	
		e.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	80	
2.	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD	5	
		b.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori “ B “	5	
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN)	a.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditangani	100	
		b.	Persentase pelanggaran Disiplin yang Ditindaklanjuti	80	
		c.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian :	LHKPN	60
				LHKASN	60
		d.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	15	
		e.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	65	
f.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	1			
4.	Meningkatkan integritas, kompetensi dan profesional APIP.	a.	Level kapabilitas APIP Inspektorat	3	
		b.	Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat	50	

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Rp.	3.365.125.000,00	APBD
2.	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	300.000.000,00	APBD
3.	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Rp.	1.597.500.000,00	APBD
4.	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Rp.	189.300.000,00	APBD
5.	Program Pencegahan dan	Rp.	496.380.000,00	APBD

	Pemberantasan KKN			
6.	Program Pengembangan Zona Integritas	Rp.	144.900.000,00	APBD
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp.	2.643.000.000,00	APBD

Samarinda, 14 Januari 2019

Inspektur Provinsi Kaltim,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a.	Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
		b.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim dan SKPD yang sesuai SAP	70
		c.	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	95
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	a.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	72
		b.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	72
		c.	Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	60
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
		b.	Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
		c.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a.	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a.	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai	95
		b.	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	85

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Penjamin Mutu Laporan Keuangan - Reviu Atas Laporan Keuangan - Pemeriksaan Kinerja SKPD	Rp .	1.749.100.000,00	APBD
2.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Rp .	660.500.000	APBD
3.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN - Penanganan Pengaduan Masyarakat - Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp .	1.515.000.000,00	APBD
5.	Pembangunan Zona Integritas - Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Rp .	103.300.000,00	APBD
6.	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Rp .	136.500.000,00.	APBD
7.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp .	70.000.000,00	APBD
8.	Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan - Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal	Rp .	61.000.000,00	APBD

Lampiran 2

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a.	Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
		b.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	80
		c.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	a.	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	97
		b.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75
		c.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	75
		d.	Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	80
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
		b.	Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
		c.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a.	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a.	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD)	95
		b.	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	95

PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		Keterangan
1.	Penjamin Mutu Laporan Keuangan - Reviu Atas Laporan Keuangan	Rp	2.369.500.000,00	APBD

	- Pemeriksaan Kinerja SKPD			
2.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja - Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda	Rp .	611.500.000,00	APBD
3.	Pencegahan dan Pemberantasan KKN - Penanganan Pengaduan Masyarakat - Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Rp .	1.033.200.000,00	APBD
5.	Pembangunan Zona Integritas - Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Rp .	103.300.000,00	APBD
6.	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Rp .	136.500.000,00.	APBD
7.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp .	343.000.000,00	APBD
8.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan - Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.	Rp .	63.860.000,00	APBD
9.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Rp .	535.000.000,00	APBD

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN : 2017

SASARAN STRATEGIS		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a. Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	TW 1 : - TW 2 : WTP TW 3 : - TW 4 : -
	b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 70 TW 3 : - TW 4 : -
	c. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 70 TW 3 : - TW 4 : -
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	a. Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95
	b. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	TW 1 : - TW 2 : 72 TW 3 : - TW 4 : -
	c. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 72

SASARAN STRATEGIS		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		TW 4 : -
	d. Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat " Sangat Tinggi "	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 60
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95
	b. Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 10
	c. Jumlah Kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2
	d. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2

SASARAN STRATEGIS		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	TW 1 : 25 TW 2 : 25 TW 3 : 25 TW 4 : 15
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	a. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 45
Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a. Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai.	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95
	b. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 85
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	TW 1 : 3 TW 2 : 3 TW 3 : 3 TW 4 : 3
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	TW 1 : 2 TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 4
	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda.	TW 1 : 9 TW 2 : 9 TW 3 : 9

SASARAN STRATEGIS		
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		TW 4 : 9
		TW 1 : 14
		TW 2 : 15
		TW 3 : 19
		TW 4 : 15
	d. Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.	TW 1 : 2
		TW 2 : 2
		TW 3 : 2
		TW 4 : 3

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

JR

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	5	6	7	8
Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemprov yang direviu	Laporan	1
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang direviu	Laporan	17
Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang diperiksa	Laporan	33
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD yang dievaluasi.	Laporan	36
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemda kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan	4

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Jumlah Laporan EKPPD Pemda Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan	9
Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diperiksa/ditangani	Laporan	20
	Pemeriksaan Dan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Tujuan Tertentu/Khusus	Laporan	10
Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN yang dilaksanakan.	Kegiatan	4
Pengembangan Zona Integritas	Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	SKPD	2

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan.	Kegiatan	4
Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti pelatihan	Orang	65
Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Pengawasan	Koordinasi Pengawasan APIP dan Eksternal APIP	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pengawasan APIP yang dilaksanakan.	Kegiatan	4

Operasional /Program/Kegiatan Generik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis)

Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan	bulan	12
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana yang dipelihara	Unit	10
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda dan pengawasan dilaksanakan	Kegiatan	36

PROGRAM	KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Orang	63
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	9

Samarinda, 4 Januari 2017

Inspektur,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP

Pembina Utama Madya

NIP. 19640519 198503 1 001

	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
ANGGARAN		
9	10	11
365,500,000	Inspektur dan Irbn-Irbn	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan reuiu atas Laporan Keuangan Pemprov dan OPD.
1,383,600,000	Inspektur dan Irbn-Irbn	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas Kinerja OPD.
660,500,000	Inspektur dan Irbn-Irbn	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKjIP OPD
	Inspektur dan Irbn-Irbn	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKjIP Pemda Kab/Kota

	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
ANGGARAN		
	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas EKPPD Pemda Kab/Kota
230,000,000	Inspektur dan Irbanwas Khusus	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang masuk untuk mengecek kebenarannya.
110,000,000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas permintaan dan inisiatif terkait masalah pengawasan
1,175,000,000	Inspektur, Pokja Saberpungli dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan KKN, Tunas Integritas, Aksi PPK dan Saberpugli
103,300,000	Inspektur dan Irbanwas Kesra	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan evaluasi kepada OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK.

ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
136,500,000	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas TLHP.
70,000,000	Inspektur, Irban-Irban dan Forkom JFA	Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) pada setiap penugasan pemeriksaan.
61,000,000	Inspektur dan Irban-Irban	Kegiatan yang dilaksanakan bersifat koordinasi pengawasan dalam rangka cakupan pengawasan dan penyusunan program pengawasan baik sesama APIP dan Eksternal APIP
1,166,480,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan Administrasi Perkantoran.
115,800,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.
424,820,000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan konsultasi pengawasan.

ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	kasubbag	
370,500,000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, workshop dan seminar.
76,500,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag	Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan mulai perencanaan sampai pelaksanaan.

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4
Meningkatnya Laporan Pengelolaan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a. Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	TW 1 : - TW 2 : WTP TW 3 : - TW 4 : -	Penjamin Mutu Laporan Keuangan
	b. Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : -	
	c. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	TW 1 : - TW 2 : 80 % TW 3 : - TW 4 : -	
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Hasil Audit dan Evaluasi APIP	a. Persentase Capaian Kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 97 %	Penjamin Mutu Laporan Keuangan
	b. Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : 80 % TW 4 : -	
	c. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : -	Penguatan Akuntabilitas Kinerja

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		TW 4 : -	
	d. Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/ Kota	TW 1 : - TW 2 : 75 Skor TW 3 : - TW 4 : -	
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan	a. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 %	Pencegahan dan Pemberantasan KKN
	b. Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 10 Kasus	
	c. Jumlah Kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 Kasus	Pencegahan dan Pemberantasan KKN
	d. Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai ZI menuju WBK/WBBM	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 2 OPD	Pengembangan Zona Integritas
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a. Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	TW 1 : 20 % TW 2 : 25 % TW 3 : 25 % TW 4 : 25 %	Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional,	a. Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	TW 1 : - TW 2 : -	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
kompeten dan berintegritas		TW 3 : - TW 4 : 45 Orang	
Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a. Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai.	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 %	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	b. Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Pengawasan	TW 1 : - TW 2 : - TW 3 : - TW 4 : 95 %	
Operasional /Program/Kegiatan Gene			
	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	TW 1 : 3 bulan TW 2 : 3 bulan TW 3 : 3 bulan TW 4 : 3 bulan	Pelayanan Administrasi Perkantoran
	b. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	TW 1 : 3 Unit TW 2 : 3 Unit TW 3 : 2 Unit TW 4 : 2 Unit	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda.	TW 1 : 2 Keg TW 2 : 2 Keg TW 3 : 2 Keg TW 4 : 2 Keg	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
	d. Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi.	TW 1 : 2 Lap TW 2 : 2 Lap TW 3 : 2 Lap TW 4 : 3 Lap	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

SASARAN STRATEGIS			PROGRAM
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	

AKSI PENCAPAIAN KINERJA

KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
5	6	7	8	9	10
Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Pemprov yang direviu	Laporan	1	400,000,000	Inspektur dan Irban-Irban
	Jumlah Laporan Keuangan OPD yang direviu	Laporan	12		
Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja OPD yang diperiksa.	Laporan	48	650,000,000	Inspektur dan Irban-Irban
	Jumlah LPPD Pemda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	10	500,000,000	Inspektur dan Irban-Irban
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Kaltim	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKJIP OPD yang dievaluasi.	Laporan	39	391,150,000	Inspektur dan Irban-Irban

KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja/LKjIP Pemda Kab/Kota yang dievaluasi.	Laporan	4	220,000,000	Inspektur dan Irban-Irban
Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diperiksa/ditangani	Laporan	20	182,000,000	Inspektur dan Irbanwas Khusus
Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN yang dilaksanakan.	Kegiatan	4	1,478,700,000	Inspektur, Pokja Saberpongli dan Irban-Irban
Penerapan Zona Integritas pada SKPD	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	SKPD	2	103,300,000	Inspektur dan Irbanwas
Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Kegiatan evaluasi temuan hasil pengawasan yang dilaksanakan.	Kegiatan	4	136,500,000	Inspektur dan Irban-Irban, Sekretaris dan Kasubbag
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Jumlah tenaga pemeriksa dan aparaturnya yang	Orang	45	63,860,000	Inspektur, Irban-Irban dan Forkom

KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
Pengawasan	mengikuti pelatihan				JFA
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengawasan yang dilaksanakan baik sesama APIP dan Eksternal APIP	Kegiatan	60	543,000,000	Inspektur, Irban-Irban dan Sekretaris

erik/Overhead (Yang Tidak Mempunyai Sasaran Strategis)

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Perkantoran	bulan	12	1,142,640,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Unit	10	141,100,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Orang	30	343,000,000	Inspektur, Sekretaris, Irban-Irban dan Kasubbag
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Laporan	9	78,000,000	Inspektur, Sekretaris dan Kasubbag

KEGIATAN					PENANGGUNG JAWAB
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	

Samarinda, 4 Januari 2018

Inspektur,



M. Sa'duddin, Ak, CA, QIA, CRMP
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640519 198503 1 001

Lampiran 4

KETERANGAN
11
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemprov dan OPD.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas Kinerja OPD.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKPPD Pemda Kab/Kota.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKjIP OPD

KETERANGAN
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan Evaluasi atas LKjIP Pemda Kab/Kota
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang masuk untuk mengecek kebenarannya.
Kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan pencegahan KKN, Tunas Integritas, Aksi PPK dan Saberpugli
Melakukan evaluasi kepada OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI menuju WBK.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas TLHP.
Kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan di Kantor

KETERANGAN

Sendiri (PKS) pada setiap penugasan pemeriksaan.

Kegiatan yang dilaksanakan bersifat koordinasi pengawasan dalam rangka cakupan pengawasan dan penyusunan program pengawasan baik sesama APIP dan Eksternal APIP

Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka peningkatan kapasitas Aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek, workshop dan seminar.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan mulai perencanaan sampai

KETERANGAN

perencanaan sampai
pelaksanaan.

Lampiran 5

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur

Tahun : 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Opini	WTP
		Persentase Laporan Keuangan Pemprov dan SKPD yang sesuai SAP	Persen	70
		Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Penetapan Kinerjanya	Persen	95
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	Skor	72
		Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab/Kota	Skor	72
		Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat Nilai Sangat Tinggi	Persen	60
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	Persen	95
		Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi.	Kasus	2
		Jumlah pelanggaran disiplin pegawai	Kasus	10
		Penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada SKPD	SKPD	2
5.	Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas	Aparatur pengawasan yang bersertifikat	Orang	45

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.	Meningkatnya	Cakupan pengawasan yang akan	Persen	95

	koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	dicapai		
		Persentase kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan Program Pengawasan	Persen	85
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	90

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Tahun : 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya laporan pengelolaan keuangan Pemprov Kaltim sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	a.	Opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim	WTP
		b.	Persentase Laporan Keuangan Pemprov Kaltim sesuai SAP	80
		c.	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang sesuai SAP	80
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP	a.	Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi dan Perjanjian Kinerja	97
		b.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD	75
		c.	Skor rata-rata hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemda Kab/Kota	75
		d.	Persentase EKPPD Kab/Kota yang mendapat predikat Sangat Tinggi	80
3.	Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan	a.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani	95
		b.	Jumlah kasus KKN di lingkungan Pemerintah Provinsi	2
		c.	Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai	10
		d.	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK/WBBM	2
4.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	a.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90
5.	Tersedianya SDM Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.	a.	Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	45
6.	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	a.	Persentase cakupan pengawasan yang akan dicapai (48 OPD)	95
		b.	Persentase kegiatan pengawasan yang sesuai dengan program pengawasan	95